

**DUKUNGAN SUARA NU DALAM KEMENANGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PADA PEMILU 1977-1982 DI KABUPATEN GRESIK**

MOH. ATTAMAMI AL-ISLAH

Jurusan Pendidikan Sejarah,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: Tamam_jiddan@yahoo.com

M. ALI HAIDAR

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berdasarkan wacana tentang hubungan Islam dengan politik atau Islam dengan Negara selalu menarik untuk dikaji. Wacana tersebut juga melibatkan berbagai kalangan diantaranya kiai, politisi, akademis, partai, dan Negara. Wacana tersebut telah melahirkan berbagai bentuk konflik dan kompromi yang mencerminkan kekuatan sekaligus kelemahan kelompok Islam sendiri.

Nahdlatul Ulama (NU) Gresik pada tahun 1973-1984 berfusi bersama unsur-unsur Islam lainnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebagai unsur yang paling dominan dalam fusi tersebut keberadaan NU sangat berpengaruh terhadap setiap gerak PPP di Gresik dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit, terutama peranannya dalam perolehan suara PPP di Gresik. Menghadapi Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 bersama unsur lain NU berusaha untuk memenangkan PPP dengan mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya. Berkaitan dengan peranan NU tersebut diatas terutama pada masa bergabung di dalam PPP dalam penelitian ini, muncul beberapa permasalahan, yaitu (1) Bagaimana strategi yang dilakukan NU Gresik dalam memenangkan PPP pada saat NU berfusi di dalam PPP (2) Bagaimana hasil perolehan suara PPP di Kabupaten Gresik pada saat NU berfusi di dalam PPP (3) Bagaimana peran kiai sebagai motor politik Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Gresik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui strategi yang dilakukan NU Gresik dalam memenangkan PPP pada saat NU berfusi di dalam PPP. (2) Mengetahui hasil perolehan suara PPP di Gresik pada saat NU berfusi di dalam PPP. (3) Untuk mengetahui peran kiai sebagai motor politik Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Gresik.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahap yaitu heuristik. Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah kabupaten Gresik, sedangkan lingkup temporal penulis mengambil tahun 1973-1984 karena pada tahun tersebut NU Gresik bersama unsur Islam lainnya melakukan fusi ke dalam PPP. Dengan berbagai strategi yang dilakukan NU Gresik berusaha untuk memperoleh suara PPP sebanyak-banyaknya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NU di Gresik berdiri pada tahun 1934 setelah beberapa tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1930 dilaksanakannya Mukhtamar NU di Pekalongan. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian NU di Gresik diantaranya Kyai Maimun Adnan, Kyai Toyib. Latar belakang berdirinya NU di Gresik adalah untuk mendukung berdirinya NU secara nasional. Dalam perjalanan politiknya, NU pernah bergabung dalam MIAI, menjadi anggota istimewa Masyumi, dan mendirikan Partai politik NU sendiri, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan terakhir mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa.

Secara politis pada tahun 1973-1984 kekuatan NU tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kebijakan pemerintah Orde Baru menyederhanakan partai menjadi dua partai dan satu golongan ini memaksa NU Gresik bersama Syarekat Islam Indonesia (PSII), Perti, Parmusi (yang kemudian berubah menjadi Muslimin Indonesia) untuk berfusi ke dalam PPP pada tanggal 5 Januari 1973. Dalam upaya untuk memenangkan PPP di Gresik, NU melakukan berbagai strategi yaitu dengan memanfaatkan keberadaan NU sebagai organisasi massa yang memiliki pengikut yang jumlahnya tidak sedikit baik di tingkat nasional maupun lokal yang dalam hal ini adalah Gresik, mengerahkan ulama-ulama NU Gresik untuk terlibat langsung dalam proses kampanye yang dilakukan di beberapa daerah di kabupaten Gresik, dalam kegiatan kampanye PPP para ulama NU di Gresik berusaha untuk memikat hati masyarakat agar menyalurkan aspirasi politiknya ke PPP dengan berbagai cara termasuk menggunakan tema perjuangan Islam, Sebagai hasilnya PPP di Gresik mampu menjadi kekuatan terbesar, dan menjadi tandingan Golkar yang cukup berarti dalam Pemilihan Umum 1977 sampai pada Pemilu 1982. Hasil yang diperoleh PPP di Gresik diluar dugaan baik PPP sendiri maupun Golkar atau PDI, yaitu dengan memperoleh suara sebanyak 191.698 dengan mendapat 18 kursi pada pemilu 1977 dan 194.843 dengan mendapat 16 kursi pada pemilu 1982. Secara umum perolehan suara PPP di Gresik pada Pemilu 1977 dan 1982 stabil dan penyebarannya hampir merata di seluruh wilayah kecamatan.

Kata Kunci : Nahdlatul Ulama, Perolehan Suara, Partai Persatuan Pembangunan

Abstract

This thesis is based on the discourse about Islam with politics or relations with the Islamic State is always interesting to study. The discourse also involves various groups including kiai, politicians, academics, party, and state. The discourse has given rise to various forms of conflict and compromise that reflects the strength and weakness of the Islamists themselves.

Nahdlatul Ulama (NU) in the year 1973-1984 Gresik fuse with other elements in the Islamic United Development Party (PPP). As the dominant element in the fusion palig where NU is very influential on any motion PPP in Gresik and contributed not a little, especially its role in the acquisition of the PPP in Gresik. Facing the 1977 election and the 1982 election with the other elements of the PPP NU trying to win by collecting the sound as much as possible. In connection with the above, especially the role of NU during the PPP joined in this study, appear some problems, namely (1) What strategy do NU Gresik in PPP when NU won the fuse in the PPP (2) How do the results of the vote in the PPP Gresik when NU fuse in the PPP (3) What is the role of political kiai as motors Development Party in Gresik. The purpose of this study was to (1) determine the strategy that made NU Gresik in PPP when NU won the fuse in the PPP. (2) Knowing the voting results in Gresik PPP when NU fuse in the PPP. (3) To mengetahui kiai role as the motor of the United Development Party politics in Gresik.

To examine these problems methods used in this study is the method of historical research, which includes four stages heuristic. Scope of this research are spatial in Gresik regency, while the temporal scope of the years 1973-1984 because the author took in the NU Gresik with other Islamic elements fuse into the PPP. With a variety of strategies that do NU Gresik seeks to obtain as much as possible the PPP.

The results of this study indicate that NU in Gresik established in 1934 after several years previously during the implementation of the 1930 NU Congress in Pekalongan. The characters were instrumental in the establishment of NU in Gresik including Adnan Maimoon Kyai Kyai Toyib. The background of the establishment of NU in Gresik is to support the establishment of NU nationally. In the course of political, NU had joined in MIAI, a special Masjumi, and founded his own political party NU, joining the United Development Party, and the last declared National Awakening Party.

Politically the 1973-1984 year are members of the NU strength pembagunan Unity Party (PPP). New Order government policy meyerederhanakan party into two parties and one faction is forced NU Gresik with Syarekat Islam Indonesia (PSII), Perti, Parmusi (which later turned into Muslim Indonesia) to fuse in the PPP on January 5, 1973. In an effort to win the PPP in Gresik, NU perform a variety of strategies, namely the existence mamfaatkan NU as an organization that has a mass of followers whose numbers were a little better at the national and local level which in this case is Gresik, NU clerics exert Gresik to be directly involved in the campaign is conducted in several areas in kabupaten Gresik, the PPP campaign NU clerics in Gresik seeks to captivate the public to channel their political aspirations to PPP in various ways, including using the theme of Islamic struggle, as a result of PPP in Gresik to become the greatest power, Golkar and become a significant rival in the general election in 1977 until the 1982 election. The results obtained in Gresik PPP PPP unexpected either alone or Golkar or PDI, ie by acquiring voting 18 191 698 to get a seat at the 1977 general election and received 194 843 with 16 seats in the 1982 election. In general, the acquisition of the PPP in the 1977 elections and Gresik in 1982 and the steady spread almost evenly throughout the district area.

Keywords : NU, Vote Results, the United Development Party

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama atas prakarsa KH Hasyim Asy'ari, oleh pendirinya organisasi ini disingkat NU. NU didirikan sebagai wadah untuk mempersatukan diri dan langkah didalam tugas memelihara, melestarikan, mengemban, dan mengamalkan ajaran Islam yang mengikuti salah satu empat mazhab (Imam syafii) dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

Dalam memahami keterkaitan NU dengan politik perlu dikemukakan lebih dahulu pengertian politik yang dapat dijadikan pijakan untuk melihat keterlibatan politik NU. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu¹. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang, politik adalah kekuasaan yang digunakan untuk mempengaruhi hal-hal pokok yang berhubungan

¹Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia. 1982. Hal. 160-161.

dengan kegiatan-kegiatan pemerintah². Ruang lingkup politik tidak hanya menyangkut berbagai hal seputar pemerintah, tetapi juga berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dan individu-individu. Berbagai kegiatan tersebut merupakan cara bagi rakyat yang berada di luar pemerintah untuk mempengaruhi proses politik dalam pemerintahan. Politik merupakan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Dari beberapa definisi tersebut di atas bahwa ternyata pengertian politik itu sangat luas dan kompleks, semua kegiatan yang berhubungan dengan negara, pemerintah, kekuasaan, kebijakan-kebijakan umum merupakan kegiatan politik³.

Pada tahun 1973 pemerintah membuat suatu kebijakan restrukturisasi partai politik berdasarkan kelompok ideologis dari 9 partai menjadi 2 partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Gagasan penyederhanaan ini diawali dengan pengelompokan partai dalam parlemen. Pemerintah menyarankan pembentukan berdasarkan dua kelompok: (1) kelompok materiil-sprituil, terdiri atas parati-partai yang menekankan pembangunan materiil tanpa mengabaikan aspek spiritual, yang terdiri dari PNI, Murba, IPKI, Partai Katolik, dan Parkindo. (2) kelompok sprituil-materiil, menekankan pembangunan spiritual tanpa mengabaikan aspek materiil, terdiri atas NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Pengelompokan-pengelompokan partai ini berlanjut dengan fusi partai politik. Pada tanggal 5 Januari 1973 empat partai politik Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) dan Pergerakan Tarbiyah Islam (Perti) berfusi dalam *Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*. Dan pada tanggal 10 Januari 1973, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan

Indonesia (IPKI) berfusi dalam *Partai Demokrasi Indonesia (PDI)*⁴.

Bagi umat Islam fusi partai politik tersebut mempunyai dua makna : (1) sebagai akhir sejarah panjang peranan parpol-parpol Islam, (2) sebagai awal persatuan partai politik Islam. Pertamakalinya dalam sejarah Indonesia partai politik Islam bisa bersatu dalam sebuah organisasi⁵. Dalam perkembangannya Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai politik yang tetap mempertahankan asas Islam dan memperjuangkan kepentingan umat.

Dalam fusi partai-partai Islam ini, NU merupakan partai yang memiliki masa yang jauh lebih besar dari pada partai-partai yang lain. Dua diantaranya adalah partner dalam Liga Muslim yaitu PSII dan Perti. Kedua partai ini sangat kecil. Satu-satunya partner signifikan NU di PPP adalah Parmusi. Menurut pemilu pada tahun 1971, Parmusi mendapat 24 kursi di DPR, sementara NU 58, PSII 10 kursi dan Perti 2 kursi.

Bagi NU, peleburan kedalam PPP seperti kembali kemasa dimana ia menjadi bagian dari Masyumi. Dapat diramalkan, sebagian problem dan konflik muncul kembali kepermukaan, kecuali seandainya ketimpangan antara kekuatan massa pendukung yang besar dan jumlah politisi yang berkeahlian dapat diatasi dengan baik. Meskipun demikian, posisi awal NU lebih baik karena NU merupakan kelompok dominan dalam PPP.

Salah satu aspek yang menarik dari fusi partai-partai Islam kedalam PPP adalah bahwa penggabungan sebenarnya lebih didorong oleh faktor luar, dalam hal ini adalah desakan dari pemerintah. Kenyataan ini mengakibatkan rendahnya integritas diantara unsur-unsur partai yang telah melebur kedalam Partai Persatuan Pembangunan. Meskipun keempat unsur yang berfusi kedalam Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai-partai Islam, hal ini tidak berarti bahwa persepsi agama dan pandangan politik mereka adalah sama. Rendahnya integritas partai yang berfusi tersebut mengakibatkan sering terjadinya kemelut dalam tubuh partai.

²SudarnoShobron. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press. 2003. Hal. 48.

³Deliar Noer. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali. 1983. Hal. 43-44.

⁴Abdul Azis Thaba. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996. Hal. 235.

⁵Syamsuddin Haris. *Partai Persatuan Pembangunan, Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana. 1991. Hal. 148.

Pada awal-awal pemilu PPP mampu menunjukkan jati dirinya sebagai partai Islam yang memiliki banyak pendukung, ini dikarenakan adanya dukungan oleh para ulama dan kyai yang ada di Gresik, dan merupakan hasil dari perjuangan para anggota dan kader PPP. Ini dapat kita lihat pada pemilu 1977 dimana PPP mampu memperoleh Suara 26,29% dan Golkar sebagai partai pemerintah memperoleh suara 62,11%. Pada pemilu 1982 suara PPP naik drastis dengan perolehan suara 27,78% sedangkan Golkar 64,34%. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari peranan partai-partai Islam yang tergabung dalam fusi, tidak terkecuali NU. NU memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perolehan suara PPP pada waktu itu, menimbang bahwa NU sendiri merupakan organisasi yang mempunyai pengikut dalam jumlah yang sangat besar baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan masuknya NU kedalam fusi, secara formal terikat dengan PPP sehingga warga NU menyalurkan aspirasi politiknya melalui PPP. Warga NU menyalurkan aspirasinya kepada partai fusi ini sampai pada tahun 1984, dimana PBNU mengambil keputusan untuk keluar dari keanggotaan fusi partai, ini diawali dengan adanya konflik internal antara unsur-unsur yang berfusi dalam PPP, kebijakan ini terkenal dengan nama kembali ke *Khittah* 1926. Dengan keluarnya NU dari keanggotaan ini secara organisatoris NU tidak terikat dengan organisasi sosial politik manapun, NU telah kembali pada jati dirinya sebagai lembaga sosial keagamaan seperti pada awal pembentukannya.

Kehidupan politik di Gresik pada tahun 1973-1984 pada umumnya masih cukup dikatakan stabil dalam arti kata tidak sampai mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, peredaran perekonomian, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat pada umumnya. Aspirasi politik masyarakat tersalurkan melalui partai politik yang ada yaitu Golongan Karya (Golkar) yang sebagian besar terdiri dari mereka yang bekerja di bidang pemerintahan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebagian besar terdiri dari kalangan agamis, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sebagian besar berasal dari kalangan Nasionalis. Persaingan antara kekuatan politik satu dengan yang lain terlihat dinamis, tidak terjadi ketegangan-ketegangan yang bersifat

fisik. Namun kehidupan partai politik dalam proses kiprah perjuangannya juga pernah mengalami pasang surut. Misalnya pada saat selesainya Pemilu 1977, yaitu pada awal tahun 1978 partai-partai politik di Gresik mengalami sedikit kendala dalam upaya untuk memperjuangkan aspirasi politik pendukungnya. Hal tersebut terjadi akibat logis dari suatu langkah kearah konsolidasi dalam tubuh mereka masing-masing, namun demikian kondisi semacam ini masih dalam batas-batas pada tubuh pimpinannya yang belum menjangar pada masyarakat pada umumnya, pengikut atau pendukung-pendukungnya pada khususnya.

Dalam kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak bulan Maret 1978 terjadi keretakan diantara sesama tokoh-tokoh mereka. Keretakan itu diawali adanya keinginan tokoh muda dari unsur NU untuk meduduki jabatan atau kedudukan fungsionaris. Hal tersebut semula ditimbulkan oleh kurang adanya rasa kepercayaan antar tokoh, dan berakhir dengan usul penarikan kembali Sai Musa dari keanggotaan DPRD Kabupaten Gresik.

Kemelut yang terjadi di dalam tubuh parpol tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat secara umum sehingga tidak menimbulkan permasalahan dapat mengganggu jalannya proses demokrasi. Dalam bidang pemerintahan, pembangunan, maupun usaha peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan yang cukup berarti.

Gresik sebagai salah satu daerah basis NU di Jawa Timur juga berperan aktif dalam mengikuti Pemilu 1977 dan Pemilu-pemilu berikutnya. NU kabupaten Gresik telah berperan serta dalam upaya untuk memenangkan PPP dalam Pemilu 1977 sampai pada tahun 1984. Berbagai upaya yang dilakukan oleh NU Gresik mampu membawa PPP menjadi kekuatan terbesar dan disusul oleh Golkar di kabupaten Gresik, yaitu dengan memperoleh suara sebanyak 191.698 dengan mendapat 18 kursi pada pemilu 1977 dan 194.843 dengan mendapat 16 kursi pada pemilu 1982⁶.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang bagaimana NU Kabupaten Gresik memberikan kontribusinya dalam usaha untuk memenangkan PPP pada saat tergabung dalam

⁶Badan Arsip daerah Gresik

fusi bersama partai-partai Islam lainnya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul skripsi “Dukungan Suara NU Dalam Kemenangan PPP Pada Pemilu 1977-1982 di Kabupaten Gresik”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Peneliti melakukan penelitian dengan prosedur sesuai dengan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu *Heuristik* (penelusuran sumber), kritik sumber, interpretasi, dan yang terakhir Historiografi.

Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah *heuristik*. Peneliti berusaha mencari sumber – sumber sejauh yang diperlukan. Pencarian sumber – sumber tersebut dilakukan diantaranya di Perpustakaan Nasional (Perpustakaan Nasional) Jakarta, perpustakaan DPC PPP Kab. Gresik Perpustakaan Daerah Surabaya, Perpustakaan pusat Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Sumber – sumber yang ditemukan dalam penelusuran di tempat tersebut diantaranya; Data hasil perolehan pemilu tahun 1977-1992. Sudarno Shobron. 2003. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press. Mahmud Sujuthi. 2001. *Politik Tarekat Qadariyahwa Nasyabandiyah Jombang; Hubungan Agama, Negara, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Galang Printika. Deliar Noer. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali Perpustakaan Daerah Surabaya ditemukan sumber; I Gde Widja. 1989. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Depdikbud. Martin Van Bruinessen. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS. Aminuddin Kasdi,. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press. Sumber yang ditemukan di Perpustakaan pusat UNESA diantaranya; Munir Abdul Mulhan. 1989. *Perubahan Perilaku dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987; Dalam Perspektif Sosiolog*. Jakarta: Rajawali.. Di Perpustakaan jurusan pendidikan sejarah UNESA ditemukan sumber diantaranya : Kartodirdjo Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia Jil. VI*, Jakarta : Dep. P&K, dan Ricklefs, M.C. 1991, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press. Setelah proses *heuristik* selesai, maka proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan apakah sesuai (relevan) dengan apa yang akan diteliti hingga dari proses kritik sumber dapat ditemukan fakta – fakta sejarah yang berkaitan dengan Dukungan Suara NU Dalam Kemenangan PPP Pada Pemilu 1977-1982 di Kabupaten Gresik.

Setelah fakta – fakta sejarah didapatkan dalam proses sebelumnya maka tahap selanjutnya adalah melakukan interpretasi yaitu dengan menghubungkan fakta – fakta yang telah didapatkan sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan sejarah sesuai dengan fakta yang didapatkan mengenai apa yang diteliti oleh penulis yaitu “Dukungan Suara NU Dalam Kemenangan PPP Pada Pemilu 1977-1982 di Kabupaten Gresik”. Setelah proses interpretasi selesai, maka selanjutnya adalah tahap penulisan sejarah yang lazim disebut dengan Historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Berdirinya NU di Gresik

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan NU di Gresik tidak bisa terlepas dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan NU secara nasional. Pendirian NU di Gresik tidak bersamaan dengan berdirinya NU di tingkat nasional, yaitu tanggal 31 Januari 1926. Ini terjadi karena meskipun sudah banyak tokoh dan para ulama menyatakan masuk kedalam NU akan tetapi pada tahun 1926 mereka belum mengetahui anggaran dasar NU sebagai pedoman untuk melangkah kedepan, sehingga aktifitas NU pada waktu itu belum sesuai yang diharapkan. NU di Gresik berdiri pada tahun 1934 setelah beberapa tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1930 dilaksanakannya Mukhtar NU di Pekalongan. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian NU di Gresik diantaranya Kyai Maimun Adnan, Kyai Toyib⁷.

Latar belakang berdirinya NU di Gresik adalah untuk mendukung berdirinya NU secara nasional. Hal ini diawali dengan adanya surat dari KH Hayim Asy'ari yang disampaikan oleh para tokoh ulama di Gresik diantaranya Kyai Maimun Adnan mengenai gagasan mendirikan NU yang isinya tentang permintaan agar Kyai Maimun Adnan membantunya untuk mendirikan serta

⁷Wawancara dengan Bapak Noor Gholib

mengembangkan organisasi NU di wilayah Kabupaten Gresik. Dengan harapan agar NU mampu mengakomodasi semua aspirasi masyarakat yang paham Ahlusunnah wal Jama'ah. Dengan adanya hubungan batin yang erat antara Kyai dan pondok pesantren dapat mempercepat pendirian NU di Gresik, tokoh-tokoh ulama di Gresik merasa terpanggil untuk turut mendirikan dan mengembangkan NU⁸.

Kehadiran NU di Gresik ternyata mendapat sambutan positif oleh masyarakat Gresik. Organisasi NU dapat dengan mudah dikenal oleh masyarakat pada umumnya dan dijadikan sebagai alat perjuangan bagi warga NU khususnya. Ini terjadi karena faktor besarnya karisma para ulama yang mendirikan dan didorong oleh kondisi sebagian besar masyarakat Gresik yang telah menerima dan menganut ajaran Ahlusunnah wal Jama'ah. Terbentuknya NU di Gresik dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan ajaran Islam pengaruh mazhab Ahlusunnah wal Jama'ah yang bertujuan untuk menjawab tuduhan atas perilaku Bid'ah dari kalangan modern.

Setelah NU terbentuk sebagai organisasi, langkah utama yang dilakukan adalah berusaha untuk mengembangkan pendidikan agama Islam terutama melalui pondok-pondok, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah. Misi utamanya adalah mengembangkan dan mempertahankan ajaran Islam yang menganut salah satu dari empat mazhab. Kehadiran NU di Gresik dijadikan sebagai media untuk menegakkan ajaran Islam Ahlusunnah wal Jama'ah dalam kehidupan masyarakat Gresik pada umumnya. Dengan bantuan para ulama NU Gresik mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama ketika NU menjadi partai politik pada tahun 1952. Dengan kharisma yang dimiliki oleh ulama NU, masyarakat Gresik mengikuti apa yang diajarkan oleh para ulama, termasuk ajakan untuk menegakkan ajaran Ahlusunnah wal Jama'ah.

2. Hasil Perolehan Suara Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu 1977 dan 1982 di Gresik.

Pemilu 1977 merupakan Pemilu yang pertama setelah fusi partai-partai Islam ke dalam PPP. Pada saat itu PPP tampil atraktif dengan membawa bendera Ka'bah untuk memenangkan Pemilu. Dengan semangat dan kekompakan yang terjalin di antara unsur-unsur Islam yang tergabung di dalamnya PPP berusaha tampil kritis terhadap Pemerintah. Pada saat yang sama upaya sekularisasi politik

mulai dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru secara terus menerus. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila R. William Liddle melukiskan suasana Pemilu 1977 sebagai pertarungan dua kekuatan, "The Government versus Islam"⁹.

3. PPP berjuang sekeras mungkin untuk memenangkan Pemilu dengan berbagai strategi politik yang dilakukan. Guna memanfaatkan emosi pemeluk Islam, PPP tampil dengan isu-isu agama. Terutama terlihat dari munculnya lambang Ka'bah sebagai lambang partai dan fatwa KH. Bisri Syamsuri, PPP tampil sepenuhnya sebagai partai Islam. Segenap kekuatan telah dikerahkan, bahkan seruan "Allahu Akbar" (Tuhan Maha Besar) telah bergema di mana-mana selama kampanye. Bersama unsur lain yang tergabung di dalam PPP, NU Gresik bekerjasama dan tampil kompak serta solid dalam rangka memenangkan PPP, dengan harapan PPP mampu mewakili aspirasi umat Islam seutuhnya dan menjadi satu-satunya tempat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Disamping itu PPP juga dapat dijadikan sebagai media untuk mencapai cita-cita politik umat Islam dan media untuk menciptakan suatu masyarakat madani yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemilu 1982 merupakan Pemilu ketiga pada Pemerintahan Orde baru, dimana PPP masih menjadi rival berat bagi Golkar. Dengan kekuatan yang tergabung di dalamnya PPP mampu menjadi kekuatan terbesar. Pemilu ini sekaligus merupakan keikutsertaan NU dalam politik praktis karena setelah tahun 1984 NU menyatakan diri keluar dari keanggotaan fusi PPP. Sedangkan Pemilu 1987 merupakan Pemilu dimana NU tidak lagi masuk ke dalam fusi bersama partai Islam lainnya di PPP. Pada pemilu 1987 perolehan suara PPP mengalami penurunan yang sangat drastis ini disebabkan oleh keluarnya NU dari keanggotaan fusi. Hal ini merupakan fenomena yang wajar dalam politik, mengingat NU merupakan komposisi yang paling dominan dalam PPP.
5. Perolehan suara pada Pemilu 1977, Pemilu 1982 dan Pemilu 1987 di Gresik dapat dilihat lebih jelas sebagai berikut:

6. Tabel 1.

⁸Wawancara dengan bapak Sumardi.

⁹Syamsudin Haris. *Op. cit.* Hal 1

7. Jumlah Perolehan Suara Pemilu 1977-1992

Kabupaten Gresik

Pemilu	PPP	Golkar	PDI
1977	191.698	147.316	12.994
1982	194.843	172.367	18.210
1987	115.581	301.162	19.218
1992	166.564	257.093	55.332

8. (Sumber: Badan Arsip Daerah Kabupaten Gresik).

9. Table. 2

10. Perolehan Kursi Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Gresik

Pemilu	Partai Politik			Jumlah
	PPP	Golkar	PDI	
1977	18	13	1	32
1982	16	14	2	32
1987	9	25	2	36
1992	13	19	4	36

11. (Sumber: Badan Arsip Daerah Kabupaten Gresik).

12. Dari tabel 1 dan 2 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada Pemilu tahun 1977 PPP mampu menjadi kekuatan terbesar, yaitu dengan memperoleh suara 191.698 suara. Pada perolehan suara Pemilu 1982 PPP masih menjadi rival bagi Golkar dengan memperoleh suara 194.843. Namun pada Pemilu 1987 perolehan suara PPP di Kabupaten Gresik mengalami penurunan yang sangat drastis, ini disebabkan karena NU menyatakan diri untuk keluar dari keanggotaan fusi, yang terkenal dengan sebutan kembali ke Khittah 1926. Langkah NU ini disebabkan oleh salah satunya adanya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan pusat dibawah pimpinan DJ Naro sehingga tokoh-tokoh NU melakukan aksi pengembosan suara PPP di tingkat nasional pada Pemilu 1987. Aksi ini mempengaruhi perolehan suara PPP di tingkat lokal, termasuk dalam hal ini adalah Gresik. Warga NU bebas menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik atau organisasi sosial politik manapun (PPP, Golkar, atau PDI).

3. Kiai sebagai motor politik Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Gresik.

Menurut asal-usulnya, istilah kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar dengan peruntukan yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, kiai sebagai gelar kehormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat, misalnya Kiai Garuda Kencana, sebagai nama bagi salah satu kereta kuda

milik kraton Yogyakarta. *Kedua*, sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Dan, *ketiga*, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat bagi kepada ahli agama Islam (ulama) yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya¹⁰.

Kiai atau Ulama adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Sebagai pemimpin Islam informal, Kiai adalah orang yang diyakini oleh penduduk desa mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik. Hal ini dikarenakan kiai adalah orang suci yang dianugerahi berkah.

Kemampuan seorang kiai dapat diperoleh melalui keturunan atau bakat alam dan melalui metode belajar. Kemampuan seorang kiai dalam bidang ilmu agama, kemasyarakatan, kepemimpinan, dan kenegaraan mempunyai pengaruh tersendiri bagi seorang kiai¹¹. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan kiai adalah keturunan darah biru dari tokoh-tokoh atau pemimpin pada masanya, dan sudah sering terlibat dalam percaturan politik bangsa Indonesia. Sejak zaman revolusi hingga sekarang, setidaknya dapat ditelaah atau diamati melalui gerakan kultural¹². Disinilah letak peranan tradisi kiai dalam perpolitikan Islam.

Dua faktor utama pendukung posisi kuat kiai, *pertama*, kiai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan. Kepandaian dan pengetahuan yang luas tentang Islam menyebabkan kiai selalu mempunyai pengikut, baik para pendengar informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya maupun para santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya. *Kedua*, kiai biasanya berasal dari keluarga berada¹³. Dengan ilmu agama yang lebih tinggi dan keberadaan ekonomi yang

¹⁰

Ali

Maschan Moesa. *Nasionalisme Kiai*,

Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Yogyakarta:

LKiS Yogyakarta. 2007. Hal 56

¹¹Kang Young Soon. *Antara Tradisi Dan Konflik: Kepolitikan NU*. Jakarta: UI Press. 2007. Hal. 174.

¹²*Ibid*. Hal. 185.

¹³Endang Turmudi.

Perselingkuhan Kiaidan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2004. Hal. 95.

dipunyainya, kiai menjadi orang yang disegani di lingkungan masyarakatnya.

Dengan menggunakan identitas sebagai satu-satunya partai Islam, maka tidak mengherankan bila menghadapi pemilihan umum, PPP sejak awal-awal kampanye sudah menangkap kekuatan keagamaan sebagai satu-satunya perekat utama bagi pendukungnya. Sasaran kampanye PPP adalah memusatkan diri pada para pemilih tradisional, yaitu umat Islam yang selama ini telah bernaung di bawah organisasi-organisasi Islam atau organisasi Islam pendukung PPP, seperti NU, PSII, MI, dan Perti¹⁴.

Sejak pemilu 1977 para alim-ulama atau kiai memiliki peranan penting dalam memobilisasi massa agar memilih PPP. Hal ini dapat kita lihat pada fatwa yang dikeluarkan oleh K.H. Bisri Syamsuri, ketua Majelis Syuro Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Ro'is Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengatakan:

“.....menjadi teranglah kiranya bahwa perjuangan Partai Persatuan Pembangunan.....termasuk jihad fasilillah atau berjuang di jalan Allah. Karenanya.....wajib hukumnya bagi setiap peserta pemilu 1977 dari kalangan umat Islam pria maupun wanita, terutama warga Partai Persatuan Pembangunan untuk turut menegakkan Hukum dan Agama Allah dalam kehidupan bangsa kita, dengan jalan menaruh tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan pada waktunya nanti....maka barang siapa diantara umat Islam yang menjadi peserta dalam pemilu tetapi tidak menaruh tanda gambar Partai Persatuan Pembangunan, karena takut kehilangan kedudukan atau mata pencaharian maupun karena sebab-sebab lain, adalah termasuk orang-orang yang meninggalkan hukum Allah¹⁵.”

¹⁴ MasykurHasyim. *Menusantarakan Politik Islam, Jembatan Politik Partai Persatuan Pembangunan*. Surabaya: Yayasan 45. 2002. Hal 94

¹⁵ SyamsuddinHaris. *Op. cit.* Hal. 1.

Fatwa yang mewajibkan umat Islam untuk memilih PPP, terutama mengikat solidaritas massa pemilih. Pendekatan keagamaan cukup tepat. Sehingga Golkar dipaksa harus membendung laju kampanye PPP melalui beberapa jalan yaitu:

1. Sudomo, selaku Kaskopkamtib, mengingatkan PPP agar tidak lagi berkampanye dengan warna keagamaan.
2. Dikibarkannya spanduk-spanduk yang bertuliskan “tidak benar bahwa orang yang memilih Golkar kafir”.
3. Ali Murtopo bahkan mengancam dengan mengatakan: Golkar sebagai pemain, sebagai satu kekuatan politik yang sangat diperlukan Orde Baru untuk membangun bangsa, harus benar-benar bertindak sebagai pemain demokrasi. Boleh saja main keras asal dalam batas-batas peraturan permainan¹⁶.

Di Kabupaten Gresik, kiai memiliki peranan yang sangat penting dalam menahan serangan Golkar dan memobilisasi massa untuk memilih PPP. Para kiai inilah yang kemudian menjadi juru kampanye PPP. Kiai memerankan peranan yang signifikan dalam menarik dukungan dari umat Islam karena kiai pada umumnya adalah tokoh karismatik yang mempunyai otoritas. Melalui kharisma yang dimilikinya, dan diperkuat oleh legitimasi agama, seorang kiai dapat menggerakkan aksi politik¹⁷. Figur seorang kiai secara umum dalam masyarakat Gresik masih sangat mengakar dan menjadi tokoh sentral.

Pepatah yang dipegangoleh orang Gresik terutama di kalangan Gresik tradisional di pedesaan yang berpendidikan relative rendah adalah “Bapak Bebuk Guru Rato” (Bapak, Ibu, Guru, dan Ratu). Maksud Pepatah tersebut menerangkan urutan pihak yang dijunjung tinggi warga Gresik. Urutan pertama ditempati “Bapak-Bebuk” yaitu ayah dan ibu, kemudian disusul “Guru” persisnya Ulama atau Kiai. Sedangkan “Ratu” atau pemerintah menempati urutan terakhir. Kalau diusut-usut sedikit lebih kedalam, maka tempat paling strategis ditempati ulama atau kiai. Meski menempati urutan kedua setelah bapak-ibu, tapi masing-masing bapak-ibu tersebut dipastikan patuh dan menjunjung tinggi kiai. Jadi seluruh pribadi Gresik punya ketaatan amat tinggi pada kiai. Masing-masing keluarga Gresik bias any mempunyai seorang kiai panutan, yang selalu dijadikan rujukan dalam mengambil sikap.

¹⁶ MasykurHasyim. *Op cit.* Hal. 95.

¹⁷ Endang Turmudi. *Op cit.* Hal. 170.

Kepada kiai pula, warga Gresik mengadukan persoalan pribadi maupun meminta restu.

Peranan kiai yang sangat penting inilah yang kemudian dipergunakan PPP untuk meningkatkan perolehan suara pada setiap pemilu dengan menjadikannya sebagai juru kampanye atau pengurus partai. Para kiai ini pun dengan senang hati masuk dalam kepengurusan PPP. Hal ini tidak lepas dari peran PPP sebagai satu-satunya partai Islam pada masa Orde Baru.

Sebagai daerah basis NU Kabupaten Gresik mampu menyumbangkan suara yang besar kepada PPP. Pada pemilu 1977 hingga pemilu 1982 pemerintah mengalami kesulitan dalam menggolkarkan Kabupaten Gresik. Kemengan PPP di Kabupaten Gresik tidak lepas dari peranan para kiai karismatik yang dijadikan sebagai juru kampanye.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang Peranan NU Gresik dalam perolehan suara PPP (Suatu Kajian Historis Tahun 1977-1982), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi social keagamaan di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini berakidah Islam menurut paham Ahlulsunah wal Jama'ah. Pembentukan NU merupakan reaksi dari ulama tradisional dalam menjawab tuduhan yang dating dari kalangan pembaharu atau modernis. Kalangan Pembaharu atau modernis beranggapan bahwa ajaran Islam yang terdapat di Indonesia telah menyimpang dari sumber utama Al Qur'an dan Hadist dan menyatakan bahwa belajar agama Islam, tidak seharusnya bersumber dari kitab-kitab imam mazhab, tetapi hendaklah dilihat dari sumber aslinya Al Qur'an dan Hadist. Sementara kalangan tradisional mempertahankan metode mazhab dalam memahami ajaran Islam, bahkan mengikuti salah satu dari empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali) adalah wajib. Melalui NU, kalangan tradisional berusaha menerapkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlulsunah wal Jama'ah dan menganut salah satu dari empat mazhab. NU di Gresik berdiri pada tahun 1934 setelah beberapa tahun sebelumnya yaitu pada tahun 1930 dilaksanakannya Mukhtar NU di Pekalongan. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian NU di Gresik diantaranya Kyai Maimun Adnan, Kyai Toyib¹⁸. Latar

belakang berdirinya NU di Gresik adalah untuk mendukung berdirinya NU secara nasional. Dalam perjalanan politiknya, NU pernah bergabung dalam MIAI, menjadi anggota istimewa Masyumi, dan mendirikan Partai politik NU sendiri, bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan terakhir mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa. Secara politis pada tahun 1973-1984 kekuatan NU tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kebijakan pemerintah Orde Baru menyederhanakan partai menjadi dua partai dan satu golongan ini memaksa NU bersama Syarekat Islam Indonesia (PSII), Perti, dan Muslimin Indonesia (MI) untuk berfusi kedalam PPP pada tanggal 5 Januari 1973. Menghadapi Pemilu 1977 dan 1982 bersama unsure lainnya NU berusaha untuk memenangkan PPP.

Strategi yang dilakukan NU untuk memenangkan PPP di Gresik, yaitu dengan memanfaatkan keberadaan NU sebagai organisasi massa yang memiliki pengikut yang jumlahnya tidak sedikit baik di tingkat nasional maupun lokal yang dalam hal ini adalah Gresik, mengerahkan ulama-ulama NU Gresik untuk terlibat langsung dalam proses kampanye yang dilakukan di beberapa daerah di kabupaten Gresik, dalam kegiatan kampanye PPP paraulama NU di Gresik berusaha untuk memikat hati masyarakat agar menyalurkan aspirasi politiknya ke PPP dengan berbagai cara termasuk menggunakan tema perjuangan Islam, dan melakukan kerjasama di berbagai bidang antara NU dengan DPC PPP Gresik.

Sebagai hasilnya perolehan suara PPP di Gresik mampu menjadikan PPP sebagai kekuatan terbesar, dan menjadi tandingan Golkar yang cukup berarti dalam Pemilihan Umum 1977 sampai pada Pemilu 1982. Hasil yang diperoleh PPP di Gresik diluar dugaan baik PPP sendiri maupun Golkar atau PDI. Walaupun pada dasarnya angka suara yang diraih sangat besar di banding suara Golkar dan PDI, yaitu dengan memperoleh suara sebanyak 191.698 dengan mendapat 18 kursi pada pemilu 1977 dan 194.843 dengan mendapat 16 kursi pada pemilu 1982. Secara umum perolehan suara PPP di Gresik pada Pemilu 1977 dan 1982 stabil dan penyebarannya hamper merata di seluruh wilayah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

KORAN DAN MAJALAH:

Angkatan Bersenjata, 18 Agustus 1982
Kompas, 8 April 1980
Tempo, 21 Maret 1973
Tempo, 8 September 1973
Tempo, 13 Oktober 1973
Tempo, 14 November 1973

ARSIP:

¹⁸Wawancara dengan Bapak Noor Gholib, 20 April 2011

1. Hasil pemilu Badan Sosial Politik Kabupaten Gresik.

Buku-buku:

- Aziz, Abdul. 2006. *Politik Islam Politik Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budiharjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Darojat, Aliyud. 2006. *Kenahdlatul Ulama*. Semarang: CV. WidyaKarya.
- Ecip, Sinansari S. 1994. *NU; Khittah dan Godaan Politik*. Bandung: Mizan.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah dan Pengantar Metode Sejarah, Terjemahan Nugroho Noto sutanto*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Haidar, M. Ali. 1998. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasyim, Masykur. 2002. *Menusantarkan Politik Islam, Jembatan Politik Partai Persatuan Pembangunan*. Surabaya: Yayasan 45.
- Haris, Syamsudin. 1991. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Ida, Laode. 1996. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ismail, Faisal. 1999. *NU, Gus durisme dan Politik Kiai*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kang Young Soon. 2007. *Antara Tradisi Dan Konflik: Kepolitikan NU*. Jakarta: UI Press.
- Kasdi, Aminuddin. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa Uiversity Press.
- Muoesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Mulkhan, Munir Abdul. 1989. *Perubahan Perilaku dan Polarisasi Ummat Islam 1965-1987; Dalam Perspektif Sosiolog*. Jakarta: Rajawali.
- Noer, Deliar. 1983. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo, Dawam, M. 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren; Membangun Dari Bawah*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).
- Shobron, Sudarno. 2003. *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Dalam Pentas Politik Nasional*. Yogyakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sujuthi, Mahmud. 2001. *Politik Tarekat Qadariyahwa Nasyabandiyah Jombang; Hubungan Agama, Negara, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Galang Printika.
- Turmudi, Endang. 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Ummatin, Khoiro. 2002. *Perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Van Bruinessen, Martin. 1994. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Widja, I Gde. 1989. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.

WAWANCARA:

1. Bapak Noor Gholib
2. H. Sumardi, BA
3. Mahmudi
4. Ali sofyan